

## Value For Money dan Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah

Anita Triyassari<sup>1</sup>, Yudhanta Sambharakreshna<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 03-06-2024

Revised: 13-06-2024

Accepted: 27-11-2024

#### Keywords:

Kinerja Keuangan,  
Rasio Keuangan,  
Value for Money.

### ABSTRACT

**Tujuan Penelitian:** Penelitian dilakukan peneliti ini bertujuan untuk mengukur kinerja (performa) dari keuangan (*financial*) Pemerintah Daerah untuk mengetahui seberapa baik mengelola keuangan.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif memakai data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran.

**Originalitas/Novelty:** Pembaharuan penelitian ini mengkaji dan menganalisis tentang kinerja keuangan Pemerintah Daerah menggunakan 2 cara perhitungan yaitu analisis berbasis *Value for Money* serta analisis rasio keuangan, studi pada BPKAD Kabupaten Nganjuk dengan periode analisis mulai 2018-2022.

**Hasil Penelitian:** Apabila ditinjau dari analisis *Value for Money* menunjukkan hasil kinerja keuangan dalam golongan cukup ekonomi, cukup efisien, serta sangat efektif, jika menggunakan metode kedua menunjukkan hasil bahwa kemandirian keuangan daerah (*regional finance*) rendah sekali, pola hubungan instruktif atau peranan pemerintah pusat lebih dominan, desentralisasi fiskal kurang, efektivitas PAD sangat efektif dan keserasian belanja kurang baik.

**Implikasi:** Temuan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah supaya melakukan perbaikan pada pengelolaan keuangan agar menjadi lebih baik dalam menjalankan otonomi daerah.

**Research Objectives:** The purpose of this study is to measure the performance of local government finances to find out how well it manages finances.

**Research Method:** This research uses a quantitative descriptive approach using secondary data from the Budget Realization Report.

**Originality/Novelty:** This research examines and analyzes the financial performance of local governments using 2 ways of calculation, namely Value for Money-based analysis and financial ratio analysis, studies at BPKAD Nganjuk Regency with an analysis period from 2018-2022.

**Research Results:** When viewed from the Value for Money analysis shows the results of financial performance in the criteria of quite economic, quite efficient, and very effective, if using the second method shows the results of regional financial independence is very low instructive relationship pattern, less fiscal decentralization, the effectiveness of PAD is very effective and the harmony of spending is not good.

**Implications:** The findings of this study are taken into consideration by the Regional Government in order to make improvements to financial management to be better in carrying out regional autonomy.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### Corresponding Author:

Yudhanta Sambharakreshna

Program Studi Akuntansi, Universitas Trunojoyo Madura

Bangkalan, Indonesia, 69162

[yudhanta\\_fe@trunojoyo.ac.id](mailto:yudhanta_fe@trunojoyo.ac.id)

## Pendahuluan

Implementasi UU No. 20 serta No. 25 tahun 1999 yang berkaitan dengan Pemda serta perimbangan keuangan baik Pemerintah Pusat maupun daerah menjadi pendorong Indonesia untuk mengadopsi strategi otonomi daerah. Hampir setiap provinsi, kota serta kabupaten di negara Indonesia menerima dana dari Pemerintah Pusat melalui Dana Bagi Hasil sebelum adanya otonomi daerah (Melmambessy, 2022). Meskipun demikian, kemampuan untuk mengelola dan memperluas sumber-sumber pendapatan yang dapat meningkatkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan

kemajuan daerah dimungkinkan dengan adanya otonomi daerah. Dengan memperhatikan kapasitas dan keanekaragaman masing-masing daerah serta demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan, otonomi daerah diprediksi dapat memperkuat daya saing (Purwanti & Noviyanti, 2021). Untuk melakukan otonomi daerah pemerintah menggunakan acuan berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Maryanti & Munandar, 2021).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menentukan kapasitas Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membiayai inisiatif pembangunan. Tujuan akuntansi keuangan adalah untuk merencanakan, menganggarkan, mengelola, dan menilai kinerja. Anggaran ialah suatu rencana operasional organisasi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan untuk membiayai pembangunan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah (Hasibuan, 2023). Untuk mengevaluasi keberhasilan otonomi daerah secara finansial, tinjauan terhadap kinerja keuangan daerah harus dilakukan sebelum menetapkan kebijakan untuk tahun fiskal berikutnya. Hal ini dilakukan agar keberhasilan otonomi tersebut dapat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Purba *et al.*, 2024).

Pengukuran kinerja keuangan (*financial performance measurement*) adalah salah satu tolak pengukuran yang digunakan sebagai laporan operasional atas kinerja pemerintah baik pusat atau daerah (Hafipah *et al.*, 2023). Adapun tujuannya untuk mengevaluasi atau menilai memonitoring bagaimana kinerja finansial organisasi dari perpektif efisiensi (pemaksimalan kinerja) dan efektivitas anggaran. Pengukuran kinerja penting dilakukan dalam mengevaluasi akuntabilitas organisasi dalam memberikan layanan publik yang berkualitas tinggi sesuai dengan tujuannya. *Value for Money* yaitu gagasan yang berguna dalam menilai kinerja keuangan pada organisasi sektor publik. Ada tiga rasio utama yang digunakan dalam penerapan gagasan ini pada manajemen keuangan dan anggaran pemerintah: rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. (Dinanty *et al.*, 2023). Selain konsep *Value for Money* mengevaluasi kemampuan keuangan daerah untuk meningkatkan penyediaan layanan publik melalui kinerja APBD, berbagai rasio dapat diterapkan, termasuk rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efisiensi, dan rasio keserasian. Dari rasio tersebut maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat terukur secara terstruktur.

BPKAD Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab atas pengembangan dan pelayanan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan uang dan aset daerah. Badan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan standar manajemen pemda. Pelaksanaan APBD memberikan gambaran mengenai kinerjanya. Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus mampu memaksimalkan sumber daya yang menghasilkan pendapatan bagi daerah dalam rangka otonomi daerah. Demikian pula halnya dengan pengeluaran, Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus mampu menjadwalkan inisiatif yang berada di bawah ruang lingkupnya. Pemerintah Kabupaten Nganjuk wajib menyusun anggaran belanja daerah dengan mempertimbangkan sumber pembiayaannya. Kapasitas daerah untuk mengawasi APBD adalah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka menilai kinerja keuangan daerah.

Ketika Pemerintah Daerah sudah mandiri dan tidak membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer, maka mereka dianggap mandiri. Namun, pada praktiknya, pemerintah mendistribusikan dana transfer ke berbagai daerah di Indonesia setiap tahunnya. Diperkirakan transfer ke daerah akan mencapai Rp 706,1 triliun pada periode 2018 dari Rp 673,7 triliun saat tahun 2017. Setelah itu, dana tersebut kembali meningkat, mencapai Rp 756,77 triliun pada 2019 dan Rp 784,94 triliun pada 2020. Namun, transfer ke daerah kembali turun pada tahun 2021 menjadi Rp 723,48 triliun (Wulandari *et al.*, 2023).

Penelitian tentang kinerja keuangan banyak dilakukan di Indonesia. Dimana menurut penelitian Alfiani, (2024); Ramadhan *et al.*, (2021) menyatakan bahwa rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan penyelenggaraan atas dana oleh Pemerintah Daerah telah dilakukan dengan konteks pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan mengindikasikan bahwa kemampuan dari keuangan daerah dinilai masih tergolong rendah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Demikian pula menurut penelitian Deswira (2022) mencerminkan bahwa Kabupaten Tanah Datar memiliki ketergantungan tinggi pada dana transfer dan bahwa pertumbuhan PAD masih sangat rendah. Namun menurut penelitian Melmambessy (2022) tingkat kemandirian finansial tergolong moderat. Penelitian kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah secara internasional telah dilakukan oleh Kenale *et al.* (2023); Santis (2020); Subires *et al.* (2019) penelitian ini memakai data dan metode yang berbeda dan memiliki perbedaan hasil.

Berdasarkan isu-isu tersebut, penulis ingin memperluas dan menduplikasi penelitian ini dengan menggunakan penelitian sebelumnya. Namun, ada beberapa perbedaan, seperti: (1) Jangka waktu penelitian. Jangka waktu penelitian ini adalah 2018-2022. (2) Penelitian ini menggunakan *Value for Money* dan rasio keuangan, berbeda dengan rasio keuangan yang dipakai oleh peneliti lain, untuk menilai kinerja keuangan daerah (*regional financial performance value*) di Kabupaten Nganjuk.

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menilai dan mengetahui tingkat pengelolaan keuangan di Kabupaten Nganjuk dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menganalisis, mengukur, menilai, serta merekomendasikan peningkatan kinerja keuangan daerah khususnya di Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## Kajian Teori

### Teori Keagenan

Menurut Jensen & Meckling (1976) Sebuah kontrak yang memberikan agen beberapa wewenang pengambilan keputusan dikenal sebagai hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Manajer memiliki kewajiban etis untuk memaksimalkan keuntungan pemilik (prinsipal) sebagai agen mereka, tetapi mereka juga memiliki insentif pribadi untuk memaksimalkan tingkat kesejahteraan mereka sendiri. Teori keagenan dapat juga diaplikasikan bagi sektor publik. Teori keagenan dapat didekati melalui dua perspektif: hubungan antara masyarakat dan legislatif dan interaksi antara eksekutif dan legislative (Tate *et al.*, 2010; Parker *et al.*, 2018; Matinheikki *et al.*, 2022). Dalam rangka memenuhi kebutuhan publik akan informasi keuangan dan memberikan layanan terbaik, pemerintah bertindak sebagai agen atau pengelola. Sebagai pelaksana, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pemangku kepentingan memiliki akses ke data keuangan yang akurat. (Tan *et al.*, 2022; Madan & Ashok, 2023). Untuk mencegah ketidakpercayaan, pemerintah harus unggul dalam pengelolaan keuangan, karena hal ini merupakan keinginan semua pemangku kepentingan entitas termasuk masyarakat publik. Masyarakat akan mempercayai pemerintah jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik (Restiana *et al.*, 2024). Sektor publik melibatkan hubungan keagenan dalam penganggaran, di mana Pemerintah Daerah membuat anggaran, mengajukannya ke Pemerintah Pusat untuk disetujui, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran tersebut. Pemerintah Pusat harus meminta pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaannya (Wänström & Persson, 2023; Abdul & Ssonku, 2024). Legislator memberi wewenang kepada agen untuk membuat kebijakan baru, yang kemudian disetujui oleh legislatif (Zelmiyanti, 2016)

### Konsep Keuangan Daerah

Menurut Jaya (1999) Kerangka kerja kelembagaan umum, kebijakan anggaran daerah, serta pola pendapatan dan juga belanja daerah semuanya mempengaruhi keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah adalah segala jenis mata uang dan barang dengan mata uang tertentu yang diatur pada peraturan perundang-undangan daerah. (Yulinchton *et al.*, 2022). Selama keuangan daerah tidak dikuasai ataupun dimiliki oleh negara, pihak lain yang memiliki kekuasaan lebih besar, atau pihak lain yang sesuai dengan hukum perundangan yang berlaku, memperoleh kewajiban dan hak berdasarkan nilai uang. Uang atau barang yang dapat dijadikan aset daerah disebut juga sebagai keuangan daerah (Li *et al.*, 2023).

### Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah alat yang mengukur suatu kinerja atas keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan yang dijalankan (Kennerley & Neely, 2002; Korhonen *et al.*, 2023; Menhat *et al.*, 2023). Dalam organisasi sektor publik suatu keberhasilan dalam pengukuran kinerja yaitu dapat menyediakan pelayanan maksimal kepada masyarakat guna mencapai tingkat kepuasan dan kapasitas yang terbaik (Dharmika & Subanda, 2023; Taraza *et al.*, 2023). Tingkat kepuasan dan kapasitas yang baik jika dapat digapai maka, akan menghasilkan nilai kepercayaan serta dukungan dari publik (Lanin & Hermanto, 2019; Sonani & Yulia, 2021). Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh karyawan di organisasi sektor publik untuk lebih memperhatikan tingkat kepercayaan masyarakat supaya nilai dalam kinerja organisasi tetap terjaga dengan marwah tetap baik. Dengan demikian, visi dan misi yang telah dicanangkan dapat berjalan dengan secara terstruktur dan akan dapat menggapai visi dan misi tersebut.

Pengertian lain menyatakan bahwa kinerja digambarkan sebagai tingkat pencapaian yang telah diraih oleh suatu organisasi dengan terselenggaranya kegiatan dengan tepat sasaran seperti tujuan kegiatan, tercapainya visi misi, dan manfaat kinerja (Bhegawati, 2022; Taraza et al., 2023). Untuk itu, pengukuran kinerja merupakan taraf ukur nilai apakah suatu kinerja sudah dapat mencapai level yang diharapkan atau hanya sebatas terlaksana. Dengan demikian, dalam pengukuran kinerja harus terdapat evaluasi pencapaian apakah dari terlaksananya kegiatan sudah tepat sasaran atau tujuan yang diharapkan atau belum. Informasi atas pengukuran ini juga sangat penting untuk dilakukan karena mengingat hal ini sebagai fungsi refrensi tolak ukur organisasi atau perusahaan kedepannya dalam mencapai tujuan (Bandonu & Nugroho, 2023; Dahal et al., 2023). Tujuan atau target menjadi dasar nilai perolehan dalam hasil evaluasi kinerja organisasi dalam periode-periode berikutnya.

## Analisis Rasio Keuangan

Satu alat penting yang membantu pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara ialah analisis keuangan (Alshubiri et al., 2023). Pemerintah dapat mengumpulkan informasi penting untuk membantu pengambilan keputusan dengan melakukan tinjauan keuangan (Berizky & Kurniawan, 2024). Dengan menggunakan data laporan keuangan, analisis rasio keuangan pemerintah daerah menilai kinerja keuangan dari waktu ke waktu sehingga dapat memperlihatkan posisi keuangan daerah. (Hidayati et al., 2023; Sari et al., 2021). Untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah, sejumlah rasio tersedia. Rasio efisiensi, keserasian, kemandirian, dan efektivitas adalah beberapa rasio yang dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi (Rahmadani & Rudini, 2023). Rasio keuangan ini dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan data keuangan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah jenis Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Uraian yang diberikan di atas sangat jelas bahwa menilai aktivitas organisasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dan memeriksa pelaporan keuangan organisasi adalah tugas yang sangat penting (Hidayati et al., 2023). Dalam analisis rasio keuangan terdapat beberapa indikator pengukuran dan rumus dalam menentukan indikator tersebut. Berikut merupakan rumus dan indikator dari hasil analisis rasio keuangan.

## Rasio Keuangan

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian memberikan gambaran bagaimana Pemerintah Daerah (Pemda) menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari pajak dan retribusi daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan (Mulyani et al., 2021). Selain itu, rasio ini menggambarkan pembangunan dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya lokal dari sumber-sumber lain, seperti hibah atau pembiayaan pemerintah pusat (Restiana et al., 2024). Adapun rumus menghitung Rasio kemandirian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

Sumber: Putra (2018); Sabrina & Nugraheni (2022)

Kriteria kemandirian keuangan:

- Nilai rasio 0-25% memberikan indikasi klasifikasi yang sangat rendah untuk pola hubungan instruktif, memiliki arti bahwa peranan dari Pemerintah Pusat sangat mendominasi.
- Rasio 25-50% mengindikasikan tingkatan hubungan konsultatif dengan tingkat yang rendah, dalam hal ini berarti bahwa intervensi dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang.
- Nilai rasio 50-75% mengindikasikan kelompok sedang dengan pola hubungannya partisipatif, yang berarti mulai dapat melaksanakan otonomi daerah.
- Nilai rasio 75-100% menunjukkan kategori tinggi pada pola hubungan yang bersifat delegatif, yang berarti sudah tidak ada lagi intervensi dari pusat, dikarenakan sudah mandiri dalam hal otonomi daerah.

### 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (total PD) disebut dengan derajat desentralisasi (DD). Rasio ini dapat dihitung dengan membandingkan PAD terhadap total PD. Semakin besar kontribusi PAD, maka semakin kuat pula kemampuan Pemerintah

Daerah dalam melaksanakan desentralisasi. (Susilawati & Wardana, 2018). Adapun rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}}$$

Sumber: (Putra, 2018; Sabrina & Nugraheni, 2022)

Kriteria desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut:

- a) Angka perbandingan sekitar 0-10% menunjukkan standar yang sangat buruk;
- b) Angka perbandingan sekitar 10% dan 20% menunjukkan standar yang tidak memadai,
- c) Angka perbandingan sekitar 20% dan 30% menunjukkan standar yang cukup baik,
- d) Angka perbandingan sekitar 30% dan 40% mewakili standar sedang,
- e) Angka perbandingan antara 40% dan 50% mengindikasikan standar baik, dan
- f) Angka perbandingan lebih dari 50% mengindikasikan standar sangat baik.

### 3. Rasio Efektivitas PAD

Pencapaian target PAD yang telah ditetapkan menjadi dasar untuk mengukur tingkat pencapaian PAD. Rasio pencapaian PAD menunjukkan seberapa baik pemerintah dapat mencapai tujuannya dalam satu tahun. (Hidayah *et al.*, 2020). Tingginya rasio efektivitas PAD, maka diketahui semakin baik kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Rumus yang dapat digunakan:

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$$

Sumber: Putra, 2018; Sabrina & Nugraheni (2022)

Adapun kriteria Efektivitas PAD kemampuan keuangan dapat diklasifikasikan sebagai tidak efektif apabila nilai perbandingan kurang dari 75% (<75%), kurang efektif jika nilai perbandingan yang diperoleh antara 75% sampai dengan 89%, cukup efektif jika nilai perbandingan yang diperoleh antara 90% sampai dengan 99%, efektif jika nilai perbandingan yang diperoleh antara 90% sampai dengan 99%, efektif jika nilai perbandingan yang diperoleh 100%, dan sangat efektif jika nilai perbandingan yang didapatkan di atas 100% (>100%).

### 4. Rasio Keresasian Belanja

Rasio ini mencerminkan bagaimana sebaiknya Pemda mengalokasikan anggaran mereka antara belanja operasional dan belanja modal (Hartoyo & Arsyad, 2021). Rasio keresasian ini dihitung dengan menggunakan dua metode yang berbeda: rasio belanja operasi serta rasio belanja modal (Mahmudi, 2016).

Rasio Belanja operasi:

$$\frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal:

$$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Putra, 2018; Sabrina & Nugraheni (2022)

Jika rasio belanja operasional lebih besar dari rasio belanja modal, maka belanja modal mewakili rasio yang lebih rendah terhadap total belanja daerah. Jika rasio belanja operasional lebih kecil dari rasio belanja modal, maka belanja modal mewakili rasio yang lebih tinggi terhadap total belanja daerah.

### *Value for Money*

*Value for Money* ialah statistik dari kinerja yang dipakai oleh sektor publik untuk penentuan apakah pengeluaran dalam anggaran memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat (Aulia & Nugraheni, 2022). Mahmudi (2015) mendefinisikan *Value for Money* sebagai gambaran organisasi sektor

publik yang menghargai nilai uang. Konsep *Value for Money* umumnya mengacu pada penilaian kinerja organisasi sektor publik berdasarkan tiga elemen utama:

- 1) Ekonomi berfungsi sebagai dasar untuk memeriksa seberapa besar pengeluaran yang boros dan boros energi dapat dipangkas oleh organisasi sektor publik agar meminimalisir konsumsi sumber daya yang dimiliki.
- 2) Efisiensi ialah analisis pendapatan dan pengeluaran dalam kaitannya dengan standar kinerja atau tujuan yang terkait dengan standar kinerja tertentu.
- 3) Efektivitas menggambarkan bagaimana tingkat capaian program terhadap tujuan yang sudah ditetapkan.

Konsep *Value for Money (VFM)* organisasi sektor publik merupakan konsep penting dan oleh karena itu sering disebut sebagai pusat pengukuran kinerja sektor publik (Mardiana *et al.*, 2023). Berikut merupakan rumus dan indikator dari *Rasio Value for Money*.

### 1. Rasio Ekonomi

Dalam bahasa organisasi pemerintah, anggaran yang didistribusikan kepada masyarakat merupakan nilai ukur ekonomi. Sedangkan, dalam konteks organisasi pemerintahan, dimensi ekonomi merupakan ukuran alokasi dana untuk tujuan tertentu. Tujuan tertentu yang dimaksud merupakan rencana kegiatan yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan output dari kegiatan ini adalah masyarakat dapat sejahtera. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat hal yang penting dilakukan yakni anggaran yang dikeluarkan harus mencapai tingkat efektivitas dan keefisienan yaitu dilakukannya penghematan sumber daya. Penghematan terjadi ketika pengeluaran sumber daya berada di bawah anggaran yang telah ditetapkan, sedangkan pemborosan terjadi ketika pengeluaran sumber daya melebihi anggaran yang telah ditetapkan (Wahyuni *et al.*, 2022). Untuk itu, diharapkan realisasi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus tepat dan terstruktur supaya realisasi dari anggaran yang dikeluarkan dapat mencapai tingkat maksimal. Adapun rumus perhitungan dalam rasio ekonomi ialah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

**Tabel 1. Presentase Hasil Rasio Ekonomi**

Presentase Kinerja	Kriteria
> 100 persen	Sangat Ekonomi
90 persen - 100 persen	Ekonomi
80 persen - 90 persen	Cukup Ekonomi
60 persen - 80 persen	Kurang Ekonomi
<60 persen	Tidak Ekonomi

Sumber: (Mahmudi, 2018)

### 2. Rasio Efisiensi

Rasio ini dihitung melalui hasil keluaran (output) dengan penggunaan masukan (biaya keluaran) yang dibandingkan. Suatu program kegiatan APBD dianggap efisien jika memaksimalkan keluaran (output) dengan menggunakan masukan (sumber daya) yang paling sedikit (Mawardi *et al.*, 2022). Rasio efisiensi untuk melihat kesenjangan antara belanja daerah yang sebenarnya dengan jumlah realisasi pendapatan daerah (Ariyani *et al.*, 2022).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

**Tabel 2. Presentase Hasil Rasio Efisiensi**

Presentase Kinerja	Kriteria
>100 persen	Tidak Efisien
90 persen - 100 persen	Kurang Efisien
80 persen - 90 persen	Cukup Efisien

60 persen - 80 persen	Efisien
<60 persen	Sangat Efisien

Sumber: (Mahmudi, 2018)

### 3. Rasio Efektivitas

Jika organisasi proyek atau kegiatannya mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka pengukuran rasio efektivitas dapat dikatakan valid. Program dan kegiatan organisasi dianggap efektif jika keluarannya mempunyai dampak yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan (Sampow & Pangkey, 2022).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

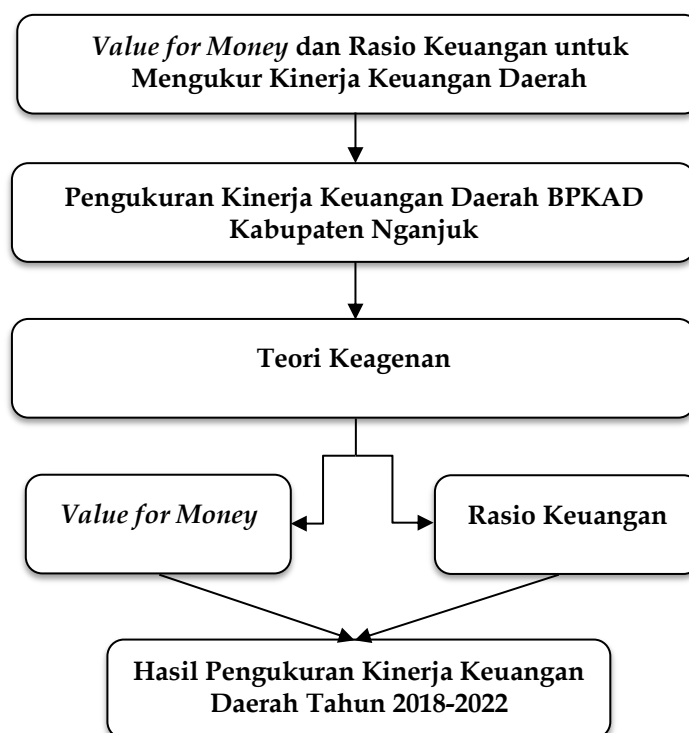
**Tabel 3. Presentase Hasil Rasio Efektivitas**

Presentase atas Kinerja	Kriteria
>100 persen	Sangat Efektif
90 persen - 100 persen	Efektif
80 persen - 90 persen	Cukup Efektif
60 persen - 80 persen	Kurang Efektif
< 60 persen	Tidak Efektif

Sumber: (Mahmudi, 2018)

### Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan ide dasar dari pemikiran penelitian, kerangka kerja disusun dengan menggunakan data, observasi, dan survei literatur. Kerangka kerja dapat membantu peneliti mengidentifikasi ide-ide besar dan argumen penelitian yang akan menjadi dasar untuk penyelidikan lebih lanjut. Manfaat lain dari kerangka berpikir ini adalah dapat mengetahui secara jelas probematika yang tengah peneliti hadapi dan objek penelitian yang akan dipilih. Dalam kerangka berpikir ini peneliti akan menyajikan suatu variabel atau fenomena yang akan dijelaskan dan digambarkan secara jelas serta terstruktur. Berikut akan disajikan gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini.



**Gambar 1. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini bermaksud untuk menilai kinerja keuangan Pemda Kabupaten Nganjuk dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Teori Keagenan (*Agency Theory*) digunakan dalam penelitian ini, yang berpendapat yaitu ketika Pemerintah Pusat menjalankan yurisdiksinya, maka Pemerintah Pusat mendelegasikan wewenang pada Pemerintah Daerah (Pemda) agar menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya, salah satunya adalah administrasi keuangan sesuai dengan capaian yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan konsep pengukuran dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) Kabupaten Nganjuk. Pendekatan tersebut yakni *Value for Money* dan Rasio Keuangan. Pendekatan inilah yang nantinya akan menentukan suatu indikator penilaian apakah dari ukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) Kabupaten Nganjuk sudah tercapai secara efektivitas atau bahkan kurang efisien. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hasil kinerja keuangan akan disajikan empat tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian dan Sumber Data

Metode merupakan suatu tata cara kinerja untuk memperoleh sesuatu yang ingin digapai Peneliti. Namun, pada konteks ini metode penelitian merupakan tata cara kerja yang dilakukan seorang peneliti dalam proses penelitian dimulai dari pencarian data, pengolahan data, dan penyusunan hasil penelitian dengan tujuan mengungkap suatu fenomena yang ada. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang diterapkan dengan landasan pada positivisme. Dalam penelitian ini, populasi atau sampel tertentu diperiksa, data dikumpulkan dengan bantuan peralatan khusus, dan analisis kuantitatif atau statistik dilakukan untuk menganalisis temuan (Sugiyono, 2019). Objek penelitian yang diambil oleh peneliti adalah pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan pendekatan pada perhitungan nilai tingkat pencapaian hasil atau performa keuangan. Analisis yang digunakan yakni *Value For Money* dan Rasio Keuangan dengan sisi ekonomis, efisiensi dan efektivitas anggaran. Data penelitian yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang didapatkan langsung dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2018 hingga 2022.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Nganjuk yang beralamat di Jalan Brantas, Babadan, Kelurahan Werungotok, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk merupakan tempat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk tahun 2018 sampai dengan 2022, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Periode penelitian ini dilakukan dari bulan Februari hingga Juni 2024.

### Teknik Analisis, Pengolahan dan Alat Pengukuran Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan *Collecting Data* (Pengumpulan Data) yang terkait dengan data realisasi dan pelaporan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) pemerintah. Hasil laporan dari analisis tersebut akan didokumentasikan dalam bentuk naratif atau tulisan. Selain dari *Collecting Data*, Reduksi data juga digunakan dalam penelitian ini. Jadi, peneliti akan memilih data yang paling sesuai dengan fokus cakupan analisis. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan untuk mengambil data dengan laporan penerapan atau pelaksanaan dan anggaran instansi terkait yakni BPKAD Kabupaten Nganjuk. Peneliti mengklarifikasi terlebih dahulu data yang telah diperoleh bahwa data pelaksanaan dan anggaran instansi memiliki hubungan dengan keterkaitan teori yang telah dirumuskan sebelumnya yakni tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ialah mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan dua pendekatan yang berbeda: analisis *Value for Money* dan analisis dengan menggunakan empat rasio keuangan. Perhitungan *Value for Money* dan Analisis Rasio dengan menggunakan formula yang dikembangkan oleh perangkat statistik *Excel* merupakan ukuran kinerja terkait profitabilitas yang digunakan sebagai metode pengukuran dalam penelitian ini. Rumus-rumus berikut ini digunakan dalam pengukuran data:



## *Value for Money*

### 1. Rasio Ekonomi

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\%$$

### 2. Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

### 3. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

## Rasio Keuangan

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

### 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Total Realisasi Pendapatan}}$$

### 3. Rasio Efektivitas PAD

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$$

### 4. Rasio Keserasian Belanja

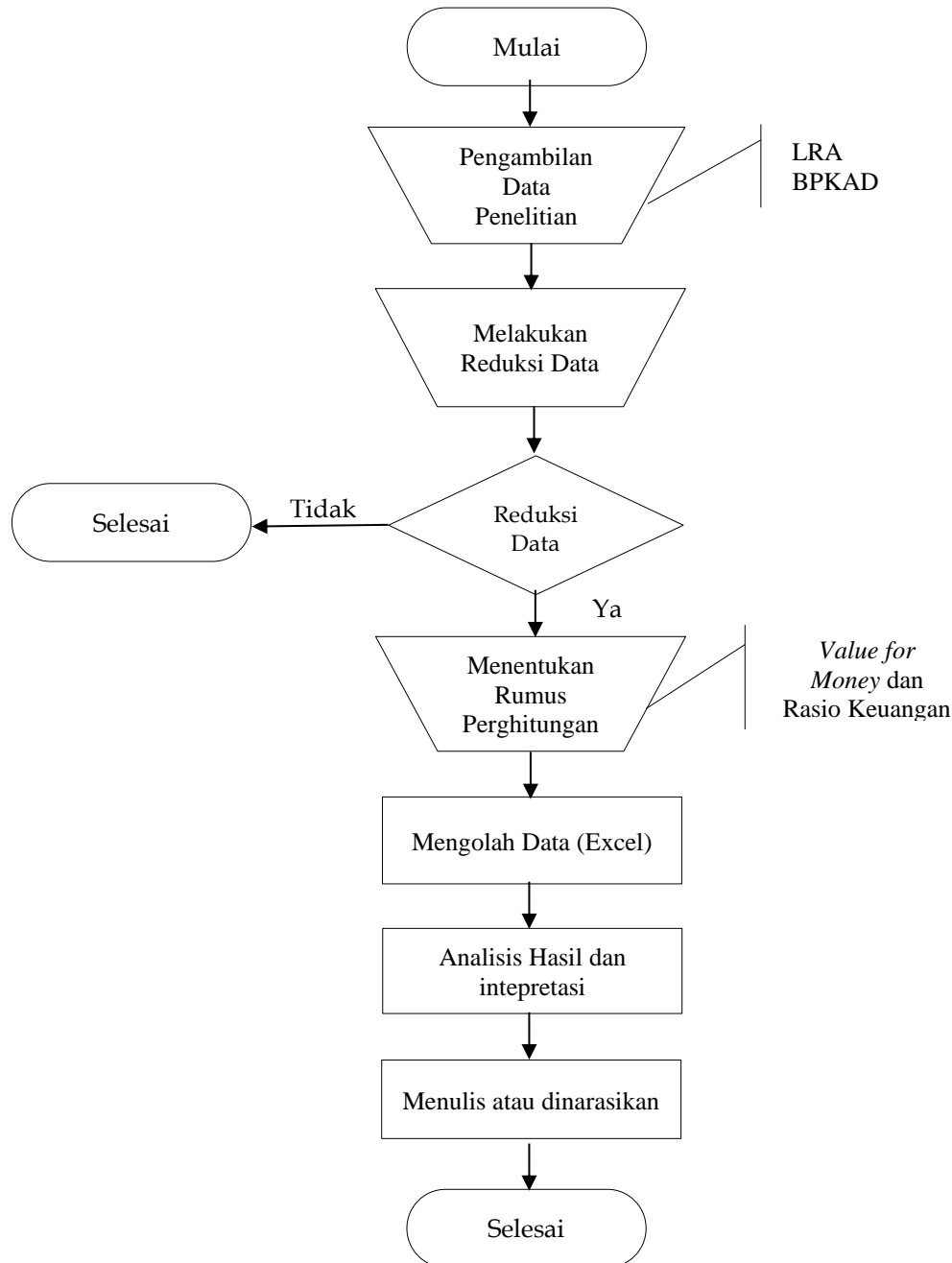
Rasio Belanja operasi:

$$\frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Modal:

$$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Metode penelitian yang dijelaskan oleh peneliti terbilang spesifik oleh para pembaca. Untuk lebih memahami penelitian yang ditulis oleh peneliti maka peneliti akan menggunakan gambaran *flowchart* dalam metode penelitian.



**Gambar 2.** *Flowchart* Metode Penelitian

#### Deskripsi Naratif:

1. Dimulai dari pengambilan data di tempat penelitian BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Nganjuk yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
2. Melakukan reduksi data dengan mengambil bagian-bagian yang dibutuhkan dalam penelitian sesuai fokus dan ruang lingkup yaitu *Value for Money* dan Analisis Keuangan.
3. Reduksi data selesai dilakukan, setelah itu melakukan kalkulasi atau perhitungan dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan yaitu rumus *Value for Money* dan Analisis Rasio Keuangan.

4. Data diolah dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi *excel*.
5. Hasil dari pengolahan data kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan kaidah penyusunan yang telah ditentukan.
6. Hasil analisis dan interpretasi tersebut kemudian di tulis dalam bentuk narasi disusun sesuai format artikel penelitian.
7. Prosedur penelitian dalam metode penelitian dinyatakan selesai.

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis berbasis *Value For Money*

Analisis kinerja keuangan menggunakan *Value for Money* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk adalah suatu proses untuk mengetahui kinerja keuangan dari Pemda Kabupaten Nganjuk selama lima periode. Menurut Mahmudi (2018) metode perhitungan *Value for Money* yang diterapkan mengintegrasikan tiga dimensi pengukuran: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Nganjuk periode 2018-2022. Hasil perhitungan analisis rasio tersebut sebagai berikut:

#### 1. Analisis Rasio Ekonomi

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 yang dimana tahun 2018-2022 capaian kinerja pengelolaan anggaran terjadi kenaikan hingga penurunan dimana saat periode 2018 ada pada rasio ekonomis 86,66%, terjadi kenaikan saat periode 2019 menjadi 89,02%, terjadi penurunan saat periode 2020 menjadi 88,15%, lalu mengalami penurunan saat periode 2021 menjadi 83,77% dan meningkat kembali saat periode 2022 yaitu 87,39%. Rata - rata selama 2018 sampai dengan 2022 mencapai 87,00%. Apabila semakin besar presentase ekonomi maka akan semakin baik. Berdasarkan rasio ekonomi yang berada di antara 80% sampai dengan 90%, kinerja keuangan Kabupaten Nganjuk dapat diketahui cukup ekonomis.

**Tabel 4. Hasil olah data menggunakan Analisis Rasio Ekonomi pada Pemda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2022**

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Target Anggaran Belanja	Rasio Ekonomi	Kriteria
2018	1.941.702.058.880	2.240.507.292.126	86,66%	Cukup Ekonomis
2019	2.124.060.858.834	2.386.171.777.763	89,02%	Cukup Ekonomis
2020	1.977.318.529.716	2.243.052.864.983	88,15%	Cukup Ekonomis
2021	1.982.387.965.882	2.366.605.532.327	83,77%	Cukup Ekonomis
2022	2.237.475.950.125	2.560.292.845.225	87,39%	Cukup Ekonomis
<b>Rata - Rata</b>	<b>2.052.589.072.688</b>	<b>2.359.326.062.485</b>	<b>87,00%</b>	<b>Cukup Ekonomis</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Nganjuk periode 2018-2022 (Data diolah, 2024)

#### 2. Analisis Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi pada tabel 5 menempatkan kinerja keuangan Kabupaten Nganjuk dari tahun 2018 hingga 2022 dalam kategori bervariasi. Pada tahun 2018, 2019, serta 2020 termasuk kategori cukup efisien dengan kisaran 80%-90%, tahun 2018 sebesar 81,94%, 2019 mengalami kenaikan yakni 84,52%, menurun kembali di tahun 2020 menjadi 81,19%, selanjutnya tahun 2021 masuk dalam kategori efisien dengan persentase 76%, dan pada tahun 2022 kembali masuk dalam kategori cukup efisien dengan persentase 89,46%. Dengan nilai rata-rata 82,62%, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dinilai cukup efisien. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam memenuhi target anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya

**Tabel 5. Hasil olah data menggunakan Analisis Rasio Efisiensi pada Pemda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2022**

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2018	1.941.702.058.880	2.369.549.960.797	81,94%	Cukup Efisien
2019	2.124.060.858.834	2.512.977.518.355	84,52%	Cukup Efisien
2020	1.977.318.529.716	2.435.396.958.079	81,19%	Cukup Efisien
2021	1.982.387.965.882	2.608.437.761.443	76,00%	Efisien
2022	2.237.475.950.125	2.501.196.777.619	89,46%	Cukup Efisien
<b>Rata - Rata</b>	<b>2.052.589.072.688</b>	<b>2.485.511.795.259</b>	<b>82,62%</b>	<b>Cukup Efisien</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Nganjuk periode 2018-2022 (Data diolah, 2024)

### 3. Analisis Rasio Efektivitas

Kinerja dari keuangan Pemda Kabupaten Nganjuk jika dilihat dari rasio efektivitas pada tabel 6 dapat dikatakan dalam keadaan baik dimana ditahun 2018-2022 menunjukkan hasil presentase masing-masing diatas 100%, hal ini masuk dalam kategori sangat efektif. Dimana di tahun 2018 menunjukkan presentase 101,93%, tahun 2019 sebesar 101,74%, tahun 2020 sebesar 104,27%, sebesar 106,71% pada tahun 2021, dan terakhir di tahun 2022 mencapai hasil presentase 101,97%. Hasil rata-rata menunjukkan 103,32% yang berarti masuk dalam kriteria sangat efektif. Dalam periode lima tahun Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah sangat efektif karena dilihat dari tahun 2018 samapi 2022 realisasi anggaran pendapatan sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mampu mempertahankan dan meningkatkan strategi untuk memastikan anggaran pendapatan terealisasi sesuai harapan, hal ini dilakukan agar mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk

**Tabel 6. Hasil olah data menggunakan Analisis Rasio Efektivitas pada Pemda Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2022**

Tahun	Realisasi Anggaran Pendapatan	Target Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria
2018	2.369.549.960.797	2.324.690.319.859	101,93%	Sangat Efektif
2019	2.512.977.518.355	2.470.068.502.184	101,74%	Sangat Efektif
2020	2.435.396.958.079	2.335.585.700.404	104,27%	Sangat Efektif
2021	2.608.437.761.443	2.444.412.672.174	106,71%	Sangat Efektif
2022	2.501.196.777.619	2.452.965.706.266	101,97%	Sangat Efektif
<b>Rata - Rata</b>	<b>2.485.511.795.259</b>	<b>2.405.544.580.178</b>	<b>103,32%</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Nganjuk periode 2018-2022 (Data diolah, 2024)

## Rasio Keuangan

Analisis kinerja keuangan menggunakan pengukuran rasio keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk ialah proses untuk mengetahui kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk selama lima periode yaitu tahun 2018-2022. Rasio desentralisasi fiskal, keserasian belanja, efisiensi PAD, dan kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2022 menjadi sumber data dalam penelitian ini. Hasil perhitungan analisis rasio tersebut sebagai berikut:

### 1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Gambaran rasio kemandirian keuangan daerah pada Tabel 7 menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki tingkatan kemandirian yang sangat rendah dengan pola instruktif karena berada pada rentang 0 sampai dengan 25 persen dengan rata-rata persentase sebesar 21,00 persen. Dimana tahun 2018 presentase rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan hasil 18,95%, tahun 2019 presentase menurun menjadi 18,08%, kemudian meningkat pada tahun 2020 yaitu menjadi 20,90%, di tahun 2021

naik kembali menjadi 23,68%, dan terakhir ditahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 23,38%. Presentase rasio kemandirian keuangan Kabupaten Nganjuk maasih berada di bawah 25%, hal ini memperlihatkan bagaimana rendahnya kapasitas Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membiayai operasi, proyek, dan layanan masyarakatnya antara tahun 2018 dan 2022, Pemerintah Daerah masih sangat mengandalkan peran pihak eksternal seperti pemerintah pusat melalui pendapatan transfer untuk mendanai kegiatan.

**Tabel 7. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pedapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2018	361.586.738.454	1.908.040.836.943	18,95%	Instruktif
2019	368.272.236.478	2.037.376.921.877	18,08%	Instruktif
2020	402.347.144.361	1.924.766.633.718	20,90%	Instruktif
2021	478.462.299.146	2.020.931.609.297	23,68%	Instruktif
2022	445.589.935.501	1.906.100.240.092	23,38%	Instruktif
<b>Rata-Rata</b>	<b>411.251.670.788</b>	<b>1.959.443.248.385</b>	<b>21,00%</b>	Instruktif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Nganjuk periode 2018-2022 (Data diolah, 2024)

## 2. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Berdasarkan tabel 8 dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Kabupaten Nganjuk saat periode 2018-2022 masih tergolong kurang dilihat dari tahun 2018 rasio derajat desentralisasi sebesar 15,26% dan pada tahun 2019 sebesar 14,65%, tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 16,52%, selanjutnya mengalami kenaikan kembali ditahun 2021 menjadi 18,34%, dan terakhir ditahun 2022 juga mengalami penurunan yaitu sebesar 17,82%. Sehingga rata-rata derajat desentralisasi fiskal selama lima periode berturut-turut hanya menunjukkan 16,52%, dimana menurut kriteria derajat desentralisasi Kabupaten Nganjuk berada pada skala interval 10%-20% yang termasuk dalam kategori kurang.

**Tabel 8. Rasio Desentralisasi Fiskal**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi	Kriteria
2018	361.586.738.454	2.369.549.960.797	15,26%	Kurang
2019	368.272.236.478	2.512.977.518.355	14,65%	Kurang
2020	402.347.144.361	2.435.396.958.079	16,52%	Kurang
2021	478.462.299.146	2.608.437.761.443	18,34%	Kurang
2022	445.589.935.501	2.501.196.777.619	17,82%	Kurang
<b>Rata-Rata</b>	<b>411.251.670.788</b>	<b>2.485.511.795.259</b>	<b>16,52%</b>	Kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Nganjuk periode 2018-2022 (Data diolah, 2024)

## 3. Analisis Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa realisasi PAD selalu melebihi yang dianggarkan setiap tahunnya, selama 5 periode rasio efektivitas PAD mengalami fluktuasi yaitu ditahun 2018 menunjukkan hasil 104,77%, tahun 2019 menunjukkan hasil 103,05%, selanjutnya tahun 2020 sebesar 124,47%, tahun 2021 sebesar 132,99%, dan terakhir ditahun 2022 menunjukkan hasil sebesar 115,98%. Capaian rasio masih melebihi 100% disetiap tahunnya dan rata-rata menunjukkan 116,25%. Temuan ini mencerminkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk mampu mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target tersebut selama kurun waktu 2018-2019 dengan hasil yang sangat efektif. Pemerintah Kabupaten Nganjuk dinilai sudah optimal dalam merealisasikan sumber-sumber PAD melebihi jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya.

**Tabel 9. Rasio Efektivitas PAD**

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas PAD	Kriteria
2018	361.586.738.454	345.138.632.616	104,77%	Sangat Efektif
2019	368.272.236.478	357.367.538.593	103,05%	Sangat Efektif
2020	402.347.144.361	323.260.574.754	124,47%	Sangat Efektif
2021	478.462.299.146	359.762.424.055	132,99%	Sangat Efektif
2022	445.589.935.501	384.183.486.327	115,98%	Sangat Efektif
<b>Rata-Rata</b>	<b>411.251.670.788</b>	<b>353.942.531.269</b>	<b>116,25%</b>	<b>Sangat Efektif</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Nganjuk periode 2018-2022 (Data diolah, 2024)

#### 4. Analisis Rasio Keserasian Belanja

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa rasio keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Nganjuk selama 5 periode dalam jangka waktu 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan setiap tahunnya menunjukkan hasil rasio belanja operasi yang lebih besar dibandingkan belanja modal. Jika dilihat dari rata-rata maka presentase belanja operasi sebesar 80,98% lebih unggul daripada presentase rasio belanja modal yang hanya sebesar 17,65% sehingga dapat diketahui berdasarkan rasio keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Nganjuk dinilai kurang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas dana Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk masih banyak dialokasikan untuk biaya operasional, sehingga proporsi belanja modal pada periode tersebut masih tetap rendah.

**Tabel 10. Rasio Keserasian Belanja**

Tahun	Realisasi Belanja Operasi	Realisasi Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasi	Rasio Belanja Modal
2018	1.600.672.235.771	339.783.946.855	1.941.702.058.880	82,44%	17,50%
2019	1.688.765.660.937	435.247.383.922	2.124.060.858.834	79,51%	20,49%
2020	1.624.378.077.485	249.630.540.424	1.977.318.529.716	82,15%	12,62%
2021	1.605.290.587.016	351.676.609.668	1.982.387.965.882	80,98%	17,74%
2022	1.785.994.641.058	445.246.033.932	2.237.475.950.125	79,82%	19,90%
<b>Rata-Rata</b>	<b>1.661.020.240.453</b>	<b>364.316.902.960</b>	<b>2.052.589.072.688</b>	<b>80,98%</b>	<b>17,65%</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Nganjuk periode 2018-2022 (Data diolah, 2024)

## Pembahasan

### Analisis berbasis *Value for Money*

Rasio Ekonomi menggambarkan besar kecilnya pengalokasian anggaran untuk membiayai suatu kegiatan. Dapat dikatakan terjadi penghematan apabila sumber daya yang dikeluarkan lebih kecil dari yang dianggarkan. Sebaliknya, jika melebihi anggaran maka akan terjadi pemborosan. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Mahmudi (2018). Berdasarkan hasil perhitungan rasio ekonomi selama 5 tahun dari 2018 sampai 2022 Kabupaten Nganjuk dalam kategori cukup ekonomis karena rasio rata-rata berada 87 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua kegiatan pemerintah selama lima tahun anggaran dapat dibiayai oleh dana tahun berjalan. Tentu saja, hal ini dapat menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu atau program yang tidak berfungsi. Jumlah yang dibelanjakan oleh pegawai, jumlah yang dibayarkan kepada perangkat daerah sebagai kompensasi atas pekerjaan mereka, dan faktor-faktor lain semuanya berdampak pada ekonomi anggaran pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk tahun 2018-2022. Faktor-faktor ini juga menjadi katalis untuk meningkatkan efisiensi aparatur daerah, sehingga pada akhirnya menciptakan sumber daya manusia atau pengawasan yang baik dan sistem tata kelola yang baik. Kabupaten Nganjuk telah mengelola anggarannya dengan sangat hemat. Dikatakan cukup ekonomis karena berkaitan dengan seberapa besar input primer, yaitu anggaran atau uang kas, dapat mengurangi input sekunder, yaitu tenaga kerja, material, fasilitas, dan barang modal yang dikonsumsi dalam menjalankan kegiatan operasional kantor, dengan tetap menghindari pemborosan dan pembelanjaan yang tidak produktif. Hal tersebut sesuai dengan riset yang dilaksanakan

oleh Sampow & Pangkey (2022) yang melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Bitung hasilnya adalah cukup ekonomis di tahun 2016.

Rasio efisiensi menunjukkan tingkat efisiensi yang diperoleh pendapatan daerah dilihat dari pengeluaran belanjanya. Kinerja keuangan Kabupaten Nganjuk dilihat dari rasio efisiensi dikatakan cukup efisien karena rasio rata-rata berada pada presentase 82,62%. Hal ini sesuai dengan indikator Mahmudi (2018) jika berada pada presentase 80 sampai 90 persen maka termasuk pada golongan cukup efisien. Semakin rendah nilai presentase efisiensi ini maka dinilai kinerja keuangan pemerintahan sangat baik. Kinerja keuangan Kabupaten Nganjuk dinilai cukup baik karena cukup mampu memaksimalkan keluaran (output) dengan menggunakan masukan (sumber daya) yang paling sedikit. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana et al., (2023) yang melakukan penelitian di Pemerintah Kota Surabaya memperoleh hasil efisien dikarenakan pengeluaran yang terkait dengan pencapaian tujuan anggaran tidak melebihi realisasi anggaran yang dikumpulkan, maka pemerintah mampu mencapai tujuan anggaran sesuai dengan jumlah target yang telah ditentukan. Untuk meningkatkan efisiensi, penganggaran perlu disesuaikan lebih lanjut, yaitu dengan cara meminimalisir penggunaan anggaran yang kurang dibutuhkan dalam masing-masing sektor.

Menurut pengukuran rasio efektivitas, jika organisasi proyek mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka pengukuran rasio efektivitas dapat dikatakan valid. Suatu organisasi dikatakan efektif jika keluarannya mempunyai dampak yang lebih besar terhadap pencapaian tujuannya. Hal ini sesuai dengan teori Mahmudi (2018). Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk tahun 2018-2022 dapat dikatakan sangat efektif karena hasil rata-rata presentase menunjukkan 103,32%. Pemerintah mampu mempertahankan dan meningkatkan strategi untuk memastikan anggaran pendapatan terealisasi sesuai harapan, hal ini dilakukan agar mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Maka untuk menangani hal tersebut, pemerintah Kabupaten Nganjuk perlu mempertahankan posisi tersebut, yaitu dengan meningkatkan pendapatan dengan menitikberatkan pada sektor-sektor tertentu yang telah disesuaikan dengan target yang ingin dicapai agar tujuan program mampu terealisasi serta menunjukkan performa keuangan dari sisi efektivitas menjadi tidak menurun. Pengukuran efektivitas ini untuk mengetahui seberapa jauh realisasi pendapatan daerah menyimpang dari target yang semestinya dicapai dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai pendapatan daerah yang tinggi, kinerja pemerintah seharusnya didorong melalui penetapan target realisasi pendapatan daerah. Maka dari itu dapat dikatakan kinerja keuangan Kabupaten Nganjuk selama 2018 sampai 2022 sudah berhasil mencapai kinerja yang efektif. Sebagaimana penelitian yang dilakukan (Dona & Lestari, 2020) pada Kabupaten OKU menunjukkan hasil sangat efektif karena Pemerintah Daerah berhasil menggapai anggaran pendapatan yang sudah ditetapkan.

## **Analisis Menggunakan Rasio Keuangan**

Kemandirian keuangan mencerminkan kemampuan membiayai sendiri aktivitas operasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhannya yang dilakukan pemerintah. Rasio ini menunjukkan sejauh mana ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber pendanaan dari luar. Hal ini sesuai dengan teori Mahmudi (2018) yaitu semakin tinggi tingkat kemandirian maka semakin kecil ketergantungan suatu daerah terhadap pihak luar (Pemerintah Pusat dan Provinsi) dan sebaliknya. Tingkat partisipasi dalam membayar pajak dan retribusi daerah, yang merupakan mayoritas pendapatan kota, juga tercermin dalam rasio ini. Tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pembayar pajak. Berdasarkan perhitungan, rasio kemandirian Kabupaten Nganjuk masih tergolong rendah, yang berarti Pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada dana eksternal dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi untuk mendanai urusan pemerintahan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nganjuk kedepannya diharapkan akan lebih memaksimalkan lagi peningkatan PAD yang bersumber dari pajak daerah maupun PAD lainnya yang sah sehingga nantinya akan semakin lebih mampu dalam hal membiayai kegiatan dan aktivitas pemerintahannya. Hal ini sesuai riset Purba et al., (2024), studi yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Toba menunjukkan bahwa, karena masyarakat tidak berpartisipasi secara signifikan dalam pembayaran pajak atau retribusi daerah, hasil kemandirian keuangan daerah sangat rendah. Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi mencerminkan kemampuan Kepala Daerah dalam menjalankan otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan keuangan daerah. Suatu daerah diklasifikasikan sebagai daerah yang otonom apabila tingkat realisasi PAD-nya lebih tinggi dari pendapatan daerah

secara keseluruhan. Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk menunjukkan pada posisi kurang karena presentase rata-rata selama 2018 sampai 2022 sebesar 16,52%. Artinya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan desentralisasi dinilai belum mampu dan kurang baik, hal ini dikarenakan dari sumbangsih PAD Kabupaten Nganjuk masih dinilai sangat rendah terhadap pendapatan daerah. Dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Nganjuk masih memiliki kewenangan yang terbatas dari pemerintah pusat untuk menyelidiki dan menangani pendapatan, dan bahwa kapasitas PAD untuk membiayai pembiayaan dan pembangunan daerah masih belum tercukupi. Oleh karena itu, perlu ada penekanan baru untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam pembayaran pajak serta retribusi. Hal ini sesuai riset yang dilakukan oleh Melmambessy (2022) yang melakukan penelitian kinerja keuangan di Kota Jayapura tahun 2017 - 2019 yang menunjukkan hasil rasio derajat desentralisasi yang kurang sehingga belum sepenuhnya bisa mandiri membiayai kebutuhan anggaran setiap tahunnya sehingga menyebabkan perlu adanya DAU dan DAK dari pihak eksternal (Pemerintah Pusat) serta lain-lain pendapatan yang sah dari Pemerintah Provinsi.

Rasio efektivitas PAD mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibandingkan dengan target berdasarkan potensi riil daerah tersebut (Pradita, Hartono, & Mustoffa, 2019). Semakin tinggi rasio efektivitas, semakin baik kinerja Pemerintah Daerah dapat dinilai. Perhitungan rata-rata rasio efektivitas PAD Kabupaten Nganjuk menunjukkan hasil 116,25%. Hal ini sejalan dengan indikator yang digunakan peneliti yaitu penelitian (Putra, 2018) yang menyatakan apabila nilai perbandingan mencapai lebih dari 100% maka dinilai sangat efektif. Maka berdasarkan capaian tersebut Pemerintah Kabupaten Nganjuk berada pada kriteria sangat efektif yang berarti pemerintah Kabupaten Nganjuk dinilai sudah optimal dalam merealisasikan sumber-sumber PAD melebihi jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya. Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Sabrina & Nugraheni, (2022) dimana efektivitas PAD di Kebumen menunjukkan hasil sangat efektif. Diharapkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk agar terus mempertahankan dan terus berusaha untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerahnya sehingga ditahun-tahun berikutnya tetap pada kriteria sangat efektif dan mengalami peningkatan.

Rasio keserasian bertujuan untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah mengalokasikan uang untuk membiayai operasi dan investasi. (Budiono, 2020; Aditya & Azmansyah, 2021). Menurut rasio ini, jumlah uang yang dialokasikan untuk infrastruktur dan fasilitas ekonomi melalui belanja modal cenderung rendah ketika nilai persentase dana untuk pengeluaran bisnis cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis keserasian belanja Kabupaten Nganjuk menunjukkan rata-rata rasio belanja operasional yang masih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya jumlah uang yang disisihkan untuk biaya operasional sebagian besar disebabkan oleh banyaknya lembaga independen dan biaya personalia yang terkait dengan pembayaran gaji pegawai negeri sipil. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum memikirkan jangka panjang daerah atau untuk pembangunan daerah dan lebih fokus pada pengeluaran rutin untuk menjalankan tugas-tugasnya. Tidak adanya pedoman yang ditetapkan untuk belanja modal menyebabkan Pemda memprioritaskan pemenuhan belanja operasi di atas belanja modal, yang menyebabkan minimnya atau tidak terpenuhinya belanja modal Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Hal yang sama dengan penelitian Kewas *et al.* (2024) dimana penelitian memakai keserasian belanja menemukan bahwa belanja operasi lebih besar daripada belanja modal, yang berarti bahwa organisasi memprioritaskan belanja operasi daripada belanja modal. Penelitian ini sejalan juga dengan yang dilakukan (Ibraim & Digdowiseiso, 2023) pada Kabupaten Malang yang menunjukkan hasil total belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja operasi sehingga untuk belanja modal tergolong kecil. Diharapkan bahwa Kabupaten Nganjuk akan memprioritaskan pendanaan sektor belanja modal yang berfungsi sebagai investasi jangka panjang. Hal ini akan dicapai dengan meningkatkan anggaran belanja modal itu sendiri dengan tujuan untuk meningkatkan PAD dalam rangka meningkatkan kedudukan dan peringkat daerah.

### **Hubungan Value For Money dan Rasio Keuangan berdasarkan indikator Pengukuran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.**

Konsep *Value for Money* (VFM) atau nilai untuk uang dalam konteks pengelolaan keuangan publik, khususnya di tingkat Pemerintah Daerah, merupakan tolok ukur penting untuk menilai seberapa efektif dan efisien penggunaan anggaran. VFM tidak hanya melihat input (anggaran yang digunakan) tetapi juga output (hasil yang dicapai). Dengan demikian, kita dapat menilai apakah anggaran yang telah dikeluarkan menghasilkan manfaat yang sepadan bagi masyarakat. Analisis VFM merupakan



pendekatan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan hanya menggunakan rasio keuangan. Untuk lebih memahami kinerja keuangan daerah dan mengimplementasikan tindakan perbaikan yang diperlukan dengan mengintegrasikan beberapa teknik analisis. Dalam penelitian ini menggunakan 4 rasio keuangan yaitu analisis kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio keserasian belanja daerah karena berhubungan dengan *Value For Money*, sebagai mana penelitian yang dilakukan (Dinanty et al., 2023).

## Kesimpulan

Berdasarkan penganalisisan dan perhitungan data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk selama periode 2018 hingga 2022 menunjukkan hasil yang bervariasi jika diukur menggunakan *Value for Money*. Selama periode penelitian rasio ekonomis menunjukkan hasil kinerja keuangan Pemerintah Nganjuk cukup ekonomi dengan rata-rata rasio 87,00%. Apabila dari rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Nganjuk cukup efisien berada pada rasio rata-rata 82,62%. Jika rasio efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten menunjukkan kriteria sangat efektif dengan rasio rata-rata berada di 103,32%.

Jika digunakan rasio keuangan untuk menghitung kinerja keuangan daerah Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, diperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 21,00% yang berarti tidak memiliki kemampuan sendiri dalam pembiayaan penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan, pembangunan, atau pelayanan masyarakat pada daerahnya. Tingkat desentralisasi fiskal sebesar 16,52% menunjukkan bahwa pemerintah Nganjuk masih kurang baik dalam melakukan desentralisasi fiskal. Rasio efektivitas PAD menunjukkan rasio rata-rata 116,25%. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Nganjuk dinilai sudah sangat efektif dalam merealisasikan sumber-sumber PAD melebihi yang dianggarkan. Selanjutnya rasio keserasian menunjukkan presentase belanja operasi sebesar 80,98% lebih unggul dari rasio belanja modal yang hanya sebesar 17,65% sehingga dinilai kurang baik.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kabupaten Nganjuk diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan daerahnya dan mengurangi pengeluaran anggaran yang tidak perlu. Melakukan analisis menggunakan berbagai metode perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam sehingga dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat. Keterbatasan penelitian ini adalah terkait data LRA dan laporan keuangan yang sulit diakses. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan membandingkan kinerja keuangan beberapa kota dan kabupaten. Harapannya, peneliti selanjutnya dapat menggunakan teknik tambahan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah dengan menggunakan alat analisis seperti SPSS. Implikasi dari penelitian yang dilakukan ialah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan keuangan agar menjadi lebih baik dalam menjalankan otonomi daerah.

## Referensi

- Abdul, M., & Ssonku, M. (2024). Implementation of Accountability and Reporting Based on Islamic Sharia in Efforts to Prevent Regional Government Financial Fraud. *Journal of Islamic Economics and Business Ethics*, 1(2), 94–107. <https://doi.org/10.24235/jiesbi.v1i2.132>
- Alfiani, A. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, 1(2), 74–87. <https://doi.org/10.56442/h23web39>
- Alshubiri, F., Elheddad, M., & Alfar, A. (2023). Public financial management indicators for emergency response challenges and quality of well-being in OECD countries. *Mind and Society*, 22(1–2), 129–158. <https://doi.org/10.1007/s11299-023-00299-x>
- Ariyani, L. D., Wafirotn, K. Z., & Wijayanti, I. W. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Realisasi Anggaran Belanja Tingkat Ekonomis, Efektivitas, serta Efisiensi pada BAPPEDA LITBANG Ponorogo. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 1(3), 394–408. <https://doi.org/10.55123/mamen.v1i3.712>
- Aulia, E. N., & Nugraheni, A. P. (2022). Analisis Value for Money Dengan Pendekatan Efektivitas Pada Kinerja Keuangan Kota Semarang Pada Tahun Anggaran 2017-2021. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 413–420. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.308>

- Bandono, A., & Nugroho, S. H. (2023). The Assessment of Company Performance Target Using Balanced Scorecard Methods. *International Journal of Professional Business Review*, 8(5), e01968. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i5.1968>
- Berizky, K. G., & Kurniawan, R. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 246-259. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3662>
- Bhegawati, D. M. S. & D. A. S. (2022). Relationship analysis of employee human resources quality and national achievement center service performance in the era of industrial revolution 4.0. *International Journal of Management*, 3(1), 327-342.
- Dahal, R. K., Ghimire, B., Rai, B., & Shahi, B. J. (2023). Customer'S Perspective on Non-Financial Performance Metrics of Telecommunication Companies: the Emerging Market Case. *Journal of Governance and Regulation*, 12(2), 8-18. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i2art1>
- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah : Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(1), 72-88. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jam/index.php/jam>
- Dharmika, I. B. M. P., & Subanda, I. N. (2023). The Effectiveness of Public Services in Realizing Good Governance. *APTISI Transactions on Technopreneurship*, 5(1SP), 77-83. <https://doi.org/10.34306/att.v5i1Sp.327>
- Dinanty, D. N., Ainiyah, N., Hartono, & Isnaini, N. F. (2023). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Dan Rasio Keuangan Di Kantor Kecamatan Gedeg Periode 2017-2021. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 173-183 e-ISSN: 2962-3987; p-ISSN: 2962-4428.
- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i2.2877>
- Hafipah, Amiruddin, Jumaidah, & Asriyani. (2023). Value for Money Analysis in Measuring Financial Performance at the Makassar Agricultural Quarantine Center. *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHES)*, 5(2), 98-102. <https://doi.org/10.56338/ijhess.v5i2.3426>
- Hartoyo, & Arsyad. (2021). Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi. *Jurnal PenKoMi:Kajian Pendidikan & Ekonomi*, 4(1), 1-17.
- Hasibuan, A. N. (2023). Financial performance analysis using value for money concept. *Journal of Management Science (JMAS)*, 6(1), 25-29. [www.exsys.iocspublisher.org/index.php/JMAS](http://www.exsys.iocspublisher.org/index.php/JMAS)
- Hidayah, N., R, K. G., Akuntansi, J., Tinggi, S., Ekonomi, I., Makassar, N., Selatan, S., & Selatan, P. S. (2020). Analisis ketercapaian dan kontribusi komponen pendapatan asli daerah kabupaten gowa. 3(April), 31-43.
- Hidayati, R. S., Yuliarti, N. C., & Halim, M. (2023). Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(2). <https://doi.org/10.30596/jakk.v6i2.16893>
- Ibraim, S., & Digidowiseiso, K. (2023). Analisis Kinerja Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 10(2), 743-759.
- Jaya, W. . (1999). *Analisis Potensi Keuangan Daerah, Pendekatan Makro*. PPPEB UGM Yogyakarta.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (1976) 305-360., 72(10), 1671-1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Kenale, M. M., Herdi, H., & Lamawitak, P. L. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdes. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 3(3), 62-77. <https://doi.org/10.55606/jurima.v3i3.2436>
- Kennerley, M., & Neely, A. (2002). A framework of the factors affecting the evolution of performance measurement systems. *International Journal of Operations and Production Management*, 22(11), 1222-1245. <https://doi.org/10.1108/01443570210450293>
- Kewas, L. F., Tawas, Y., & Sumual, F. M. (2024). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi. 5(1), 228-236.
- Korhonen, T., Jääskeläinen, A., Laine, T., & Saukkonen, N. (2023). How performance measurement can support achieving success in project-based operations. *International Journal of Project Management*,

- 41(1). <https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2022.11.002>
- Lanin, D., & Hermanto, N. (2019). The effect of service quality toward public satisfaction and public trust on local government in Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 46(3), 377–392. <https://doi.org/10.1108/IJSE-04-2017-0151>
- Li, J., Wu, Y., & Xiao, Jian, J. (2023). The Impact of Digital Finance on Energy Intensity – – New Evidence from China. *Smart Innovation, Systems and Technologies*, 358, 123–130. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-3416-4\\_10](https://doi.org/10.1007/978-981-99-3416-4_10)
- Madan, R., & Ashok, M. (2023). AI adoption and diffusion in public administration: A systematic literature review and future research agenda. *Government Information Quarterly*, 40(1), 101774. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101774>
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Uii Pres.
- Mardiana, Y., Dwiyani, A., Irma, A., & Lanting, S. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Kota Surabaya Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. 8(4), 528–535.
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2886–2899.
- Matinheikki, J., Kauppi, K., Brandon-Jones, A., & van Raaij, E. M. (2022). Making agency theory work for supply chain relationships: a systematic review across four disciplines. In *International Journal of Operations and Production Management* (Vol. 42, Issue 13). <https://doi.org/10.1108/IJOPM-12-2021-0757>
- Mawardi, D., Harianto, K., & Kusumawardani, M. R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Bappeda Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017-2021 Menggunakan Konsep Value for Money. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 1(4), 72–80. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v1i4.611>
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Efektifitas. 13, 10–15.
- Menhat, M., Yusuf, Y., Gunasekaran, A., & Mohammad, A. M. (2023). Performance measurement framework for the oil and gas supply chain. *Benchmarking*, 30(9), 3168–3193. <https://doi.org/10.1108/BIJ-11-2021-0704>
- Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Hakim, A. (2021). Driving Factors for Local Government Self-Financing Ability. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 748(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/748/1/012028>
- Parker, D. W., Dressel, U., Chevers, D., & Zeppetella, L. (2018). Agency theory perspective on public-private-partnerships: international development project. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 67(2), 239–259. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-09-2016-0191>
- Purba, S., Purba, R. A., Simangunsong, L. Y., Gultom, N. A. V. E., & Sinaga, A. P. R. (2024). *Measuring Local Government Financial Performance with Financial Ratios*. 8(1), 84–100.
- Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah kota Salatiga Tahun 2014-2018. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 1–12.
- Putra, W. (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Rajawali Press.
- Rahmadani, R., & Rudini, A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Penerapan Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(2), 133–143.
- Ramadhan, M., Tohawi, A., & Musthofa, M. S. (2021). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 5(1), 34–49. <https://doi.org/10.33857/jafr.v5i1.423>
- Restiana, R., Isma, A., & Prasaja, A. S. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun 2018-2022. *EBISMAN: EBisnis Manajemen*, 2(1), 08–24.
- Sabrina, N., & Nugraheni, A. P. (2022). Analysis of Original Local Government Revenue (Pad) on the Financial Performance of Kebumen Regency Before and During the Covid-19 Pandemic. *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)*, 2(1), 171–181.

- <https://doi.org/10.55047/jhssb.v2i1.399>
- Sampow, R., & Pangkey, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), 261–271. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2755>
- Santis, S. (2020). The demographic and economic determinants of financial sustainability: An analysis of Italian local governments. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/su12187599>
- Sari, I., Asaari, M., & Hidayah, I. S. N. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019. *Prosiding Seminar Nasional and Call for Paper STIE AAS*, 408–425.
- Sonani, N., & Yulia, A. (2021). The Effect of Service Quality on Public Satisfaction in the Public Administration Service. *International Journal of Economic, Business, and Innovation Research*, 7(02), 128–138.
- Subires, M. D. L., Muñoz, L. A., Galera, A. N., & Bolívar, M. P. R. (2019). The influence of socio-demographic factors on financial sustainability of public services: A comparative analysis in regional governments and local governments. *Sustainability (Switzerland)*, 11(21). <https://doi.org/10.3390/su11216008>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susilawati, D., & Wardana, L. K. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan : Studi Kasus BKAD Sleman. 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Tan, E., Mahula, S., & Cromptvoets, J. (2022). Blockchain governance in the public sector: A conceptual framework for public management. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101625. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101625>
- Taraza, E., Anastasiadou, S., Masouras, A., & Papademetriou, C. (2023). Sustainable Development and Implementation of Quality Management Excellence Models in Public Organizations: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, 15(10). <https://doi.org/10.3390/su15107971>
- Tate, W. L., Ellram, L. M., Bals, L., Hartmann, E., & van der Valk, W. (2010). An Agency Theory perspective on the purchase of marketing services. *Industrial Marketing Management*, 39(5), 806–819. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2009.08.005>
- Wahyuni, S., Sartika, D., & Mulyani, F. (2022). Analisis Pengukuran Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dengan Menggunakan Metode Value For Money (Studi Kasus Di Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2016-2020). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 326–334. <https://doi.org/10.47233/jppisb.v1i2.501>
- Wänström, J., & Persson, B. (2023). Local governments on an equal footing? Policy coordination between Swedish regions and municipalities in regional development policy. *Regional and Federal Studies*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/13597566.2023.2232306>
- Wulandari, R., Lestari, B. A. H., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(2), 56–69. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303. <https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Kaagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). 7(1), 11–21.